

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan politik internasional ternyata tidak hanya di dominasi oleh berbagai isu *high politics*, namun juga *low politics*. Salah satunya adalah isu tentang pembangunan negara-negara dunia ketiga melalui pariwisata. Beberapa negara pada era milenium ketiga memang berupaya mengembangkan sektor pariwisata karena karakteristiknya yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, hingga peran lainnya yang dapat membuka partisipasi sektor swasta dan masyarakat di suatu negara secara luas.<sup>1</sup>

Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Hindia, tepatnya berada di sebelah barat daya India. Secara astronomis, Maladewa berada di antara 1°-8° LU dan 72° – 74° BT. Kepulauan Maladewa atau Maldives ini secara geografis termasuk sebagai negara yang berada di Benua Asia (Asia Selatan). Maladewa merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia yaitu hanya sekitar 392.473 jiwa (2018). Sedangkan luas wilayah Maladewa adalah sebesar 298km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah ini, Maladewa juga merupakan negara dengan luas wilayah terkecil di Benua Asia ini.<sup>2</sup> Gambaran geografis Maladewa lihat peta 1.1. sebagai berikut:

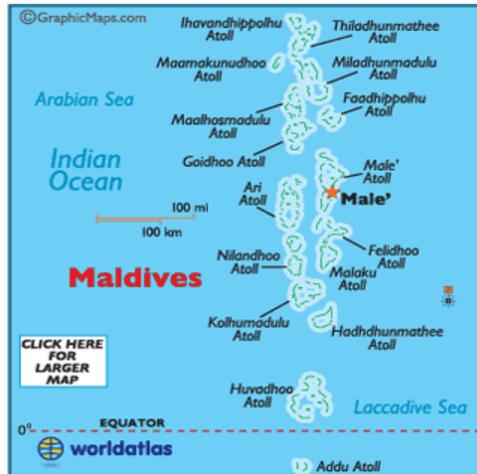
#### **Peta 1.1.**

#### **Wilayah Geografis Maladewa**

---

<sup>1</sup> Dianne Dredge and Szilvia Gyomthy. 2017. *Collaboratives Economy and Tourism (Perspective, Politic, Policy and Prospect)*. New York: Springer Publishing. hal.9.

<sup>2</sup> BBC, “Maldives Country Profile”, tersedia online dalam <<https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12651486>>, diakses 22 Maret 2019.



Sumber: Diolah dari World Atlas, “Maldives Maps”, tersedia online dalam <<https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/maldives/mvmaps.htm>>, diakses 28 Maret 2019.

Penduduk Maladewa mayoritas pemeluk Agama Islam dan Agama Islam merupakan resmi negara yang memiliki nama lengkap Republik Maladewa ini. Divehi yang merupakan bahasa resmi dari Maladewa ini juga digunakan untuk menyebut penduduk Maladewa. Tiga etnis utama di negara ini adalah etnis India Selatan, etnis Sinhalese dan etnis Arab. Nama *Maldives* berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Mala (untaian/kalung) dan Dvipa (Pulau) atau jika disambungkan menjadi “Untaian Pulau-pulau”.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Maladewa adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden. Presiden Maladewa dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan jabatan 5 tahun. Dalam sejarahnya, Maladewa merupakan negara kesultanan sejak tahun abad ke-12 dan menjadi wilayah protektorat Inggris pada tahun 1887 hingga kemerdekaannya

<sup>3</sup> CIA, “South Asian: Maldives”, tersedia online dalam <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html>>, diakses 24 Maret 2019.

pada tahun 1965. 3 tahun setelah kemerdekaanya, rakyat Maladewa melalui referendum memilih untuk menggantikan sistem pemerintahan monarki konstitusional menjadi Republik Presidensial. Ibukota Maladewa adalah Male. Kemudian pada bidang perekonomian, sektor Pariwisata dan sektor Perikanan terutama Ikan Tuna merupakan tulang punggung perekonomian Maladewa. Negara yang menggunakan mata uang Rufiyaa ini memiliki Pendapatan Domestik Bruto sebesar US\$6,901 miliar dengan pendapatan perkapita sebesar US\$19.200,-. Selain sektor Pariwisata dan Perikanan, industri-industri yang penting bagi perekonomian Maladewa diantaranya adalah Perkapalan, pengolahan kelapa, anyaman tikar, tali, kerajinan tangan, penambangan karang dan pasir.<sup>4</sup>

Bidang politik-pemerintahan Maladewa menggunakan sistem demokrasi representatif. Dalam pelaksanaannya Maladewa menggunakan sistem theokrasi yang dikenal dengan *Traditional Islamic Law*. Konsep ini dijalankan secara turun temurun dan masih eksis digunakan hingga saat ini ketika Maladewa dibawah kepemimpinan Ibrahim Mohammad Solih. Akibatnya hukum-hukum dan berbagai peraturan tentang kewarganegaraan cenderung mengadopsi syariah Islam, dimana berbagai ketentuan ini dikeluarkan oleh lembaga yang dinamakan *Unicameral Majlis*. itulah sebabnya hampir seluruh warga Maladewa adalah muslim karena memang sosial, politik dan historis Maladewa cenderung progresif terhadap nilai-nilai Islam, sedangkan pendatang ataupun wisatawan tidak terikat dalam ketentuan tersebut.<sup>5</sup>

Kepulauan Maladewa merupakan salah satu pulau indah yang terkenal di dunia. Letak Maldives ada di Samudera Hindia dan mempunyai banyak wisata pantai dengan air yang biru jernih, bermacam biota laut, dan pasir putih membentang,

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Asia News, "Maldives: Under Sharia", tersedia online dalam <http://www.asianews.it/news-en/Under-Sharia,-the-Maldives-set-to-impose-the-death-penalty-on-10-year-old-children-31157.html>, diakses 27 Maret 2019.

panorama sekitar juga menawan. Selain populer dengan pantai-pantai cantik, Maldives juga memiliki obyek wisata lain yang tentunya menarik dikunjungi. Berikut adalah lokasi-lokasi terbaik dan indah yang bisa anda kunjungi ketika berlibur ke Maladewa. Salah satu obyek wisata yang menjadi destinasi wisatawan internasional adalah Pulau Cocoa yang menjadi ajang scuba diving. Pulau ini pun memiliki fasilitas berupa resort dengan kualitas baik. Apabila anda ingin menikmati wisata selain pantai di Maladewa, anda dapat berkunjung ke Museum Nasional Maladewa. Di sini, anda bisa menyaksikan beraneka ragam peninggalan bersejarah masa Kerajaan Budha. Untuk bagian dindingnya, dihiasi oleh tulisan Al-Quran yang dibuat dengan tangan dan masih terjaga dengan baik hingga saat ini.<sup>6</sup>

Destinasi pariwisata selanjutnya adalah Museum Sultan

Pale. Museum ini memiliki banyak koleksi. Koleksi tersebut mulai dari artefak, kostum dan sepatu, koin, perhiasan, senjata dan baju besi. Untuk lokasi museum nasional ini tidak jauh dari Sultan Park Male yang bisa diakses menggunakan berbagai macam alat transportasi. Kemudian wisata sejarah, lokasi yang satu ini pas jadi pilihan. Namanya Utheemu Ganduvaru. Tempat tinggal Sultan Mohamed Thankurufaan. Berlokasi di pulau bagian utara Maladewa bernama Pulau Utheemu, termasuk dalam salah satu pulau yang berpenghuni. Mohamed Thankurufaan adalah seorang pahlawan yang sangat dibanggakan oleh penduduk Maladewa dikarenakan jasanya yang besar terhadap bangsa, melindungi bangsanya dari penjajahan Portugis.<sup>7</sup>

Meskipun Maladewa memiliki potensi wisata alam, sejarah dan lain-lainnya yang cukup potensial, namun terdapat beberapa persoalan sebelum tahun 2008 yaitu stabilitas sosial

---

<sup>6</sup> Yatra Foundation, "Maldives Island Guide", tersedia online dalam <<https://www.yatra.com/international-tourism/maldives-island-travel-guide>>, diakses 27 Maret 2019.

<sup>7</sup> *Ibid.*

yang labil. Sebagai contoh adalah kasus kerusuhan yang terjadi di Maladewa pada Februari 2012 ketika terjadi pembakaran kantor polisi dan gedung pemerintah, termasuk gedung parlemen dan pengadilan oleh para pengunjung rasa yang mampu mempengaruhi citra Maladewa di dunia internasional. Kondisi ini mendorong beberapa negara untuk mengeluarkan *early warning* kepada para wisatawan untuk tidak berkunjung ke Maladewa sepanjang Februari 2012.<sup>8</sup> Persoalan pariwisata lainnya adalah belum meratanya infrastruktur dan layanan jasa. Ketika terjadi bencana badai yang cukup dasyat, seperti pada tahun 2013 maka ekonomi akan lumpuh karena sebagian kebutuhan masyarakat Maladewa cukup bergantung dengan impor dari luar. Terlebih lagi ketika terjadi peningkatan permukaan air laut maka ini akan merusak tatanan pariwisata Maladewa jika tidak didukung dengan infrastruktur yang baik.<sup>9</sup>

Pada tahun 2008 Maladewa telah melewati tiga rezim kepemimpinan meliputi Mohammad Nashed, Mohammad Wakhid Hassan dan Abdullah Yamen. Meskipun dari ketiga tokoh ini memiliki latar belakang partai yang berbeda-beda, yaitu *Maldivian Democratic Party*, *Gaumme Itihad Party* dan *Progresif Party of Maldives*, namun ketiga kepemimpinan sepakat untuk mentransformasikan pariwisata sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Di tahun 2008 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Maladewa sebesar 1,24 juta orang, kemudian di tahun 2010 meningkat menjadi 1,36 juta orang dan di tahun 2018 mencapai angka 1,62 juta orang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kompas, “Kerusuhan Meluas di Maladewa”, tersedia online dalam <<https://edukasi.kompas.com/read/2012/02/09/09322987/kerusuhan.meluas.di.maladewa>,> diakses 16 April 2019.

<sup>9</sup> Merdeka, “Tak Sampai 100 Tahun Lagi Pulau Surga Maldives Akan Tenggelam”, tersedia online dalam <<https://www.merdeka.com/teknologi/tak-sampai-100-tahun-lagi-pulau-surga-maldives-akan-tenggelam.html>,> diakses 16 April 2019.

<sup>10</sup> Business Report, “The Maldives Has Grown to Next Level Tourism”, tersedia online dalam <<http://www.the->

Kemajuan pariwisata Maladewa menjadikan negara ini sebagai salah satu tujuan terpopuler dunia. Beberapa lembaga yang menyatakan hal ini diantaranya PATA (*Pacific Asian Tourism Association*), Bussiness Report hingga biro dan praktisi pariwisata “The Travellers”.<sup>11</sup> Pencapaian ini tidak semata-mata karena perkembangan alamiah dari pariwisata Maladewa, namun juga melalui berbagai dukungan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata melalui berbagai kebijakan dalam dan luar negeri.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang kebijakan pariwisata nasional memang menjadi kajian yang kurang populer bagi studi hubungan internasional. Ini disebabkan kebijakan pariwisata merupakan bagian dari *low politics*, dimana isu tentang politik menjadi terkesan kurang kuat dibandingkan dengan tema-tema lainnya, seperti halnya politik antar bangsa, resolusi konflik, peran organisasi internasional dan tema-tema lainnya.

Dalam studi hubungan internasional pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat beberapa kajian program studi hubungan internasional yang mengulas tentang kebijakan pariwisata, yaitu jurnal Faizal Malik yang berjudul “Strategi Pemerintah DI Yogyakarta Dalam Mempromosikan Pariwisata Daerah Ke Luar Negeri Tahun 2009-2014”.<sup>12</sup> Dalam tulisannya Faizal Malik menyatakan bahwa kebijakan promosi luar negeri DI Yogyakarta dijalankan melalui diplomasi luar

---

[businessreport.com/article/maldives-grown-tourism-level/](http://businessreport.com/article/maldives-grown-tourism-level/),> diakses 10 April 2019.

<sup>11</sup> IJSRP, “Development Tourism Policy of Maldives”, tersedia online dalam <[http://www.ijsrp.org/research\\_paper\\_apr2012/ijsrp-apr-2012-73.pdf](http://www.ijsrp.org/research_paper_apr2012/ijsrp-apr-2012-73.pdf),> diakses 10 April 2019.

<sup>12</sup> Jurnal, Faizal Malik yang berjudul “Strategi Pemerintah DI Yogyakarta Dalam Mempromosikan Pariwisata Daerah Ke Luar Negeri Tahun 2009-2014”, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

negeri dan menjalin kerjasama luar negeri dengan melibatkan berbagai elemen, diantaranya aparat pemerintah daerah, budayawan, hingga akademisi yang nantinya dapat meningkatkan dan memperkenalkan citra Yogyakarta sebagai kota berbudaya di luar negeri.

Kemudian jurnal penelitian selanjutnya dikemukakan oleh Randy Tirtasandi yang berjudul “Peran ASEAN Tourism Forum erhadap Perkembangan Pariwisata Malaysia.”<sup>13</sup> Dalam tulisannya Randy Tirtasandi menyatakan bahwa ASEAN Tourism Forum memiliki peranan penting untuk membawa promosi pariwisata Malaysia ke luar negeri meliputi upaya dalam mempromosikan Malaysia melalui tagline “Malaysia Trully Asia”. Kemudian melalui forum tersebut Malaysia juga mengambil kesempatan dalam membuka diri melauai kebijakan *travel exchange* dan pembebasan visa.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk memperkuat profil Maladewa di dunia internasional ?”

### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjelaskan untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas penulis menggunakan kerangka teori, yaitu konsep kebijakan pengembangan pariwisata dan kebijakan kerjasama luar negeri. Kedua teori ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan bentuk kebijakan pemerintah Maladewa dalam

---

<sup>13</sup> Jurnal, Randy Tirtasandi, “Peran ASEAN Tourism Forum erhadap Perkembangan Pariwisata Malaysia.” Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

mengembangkan sektor pariwisata untuk memperkuat profil Maladewa di dunia internasional.

### **1. Konsep Kebijakan Pengembangan Pariwisata**

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta atupun individu. Melalui definisi kebijakan ini maka dapat difahami bahwa kebijakan memiliki peranan penting bagi rezim pemerintahan di suatu negara agar segala tindakan-tindakan dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>14</sup>

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
- b. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.

---

<sup>14</sup> John. Swarbrooke, 1996, *Development and Management of Visitor Attractions*, Oxford: Butterworth-Heineman Publishing, hal.99.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- c. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
- d. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
- e. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek fisik menurut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya diantaranya aspek geografis, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, vegetasi dan lain-lainnya.
- b. Aspek daya tarik pariwisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong wisatawan untuk datang mengunjunginya. Murray menyebutkan “... *a thing or feature which draws people by appealing to their desires, taste, etc. Especially an interesting or amusing exhibition which ‘draws’ crowds*”. Selain itu, Murray juga menyatakan bahwa “*attraction are the on-location places in region that not only provide the things for tourist to see and do but also offer the lure to travel*”.
- c. Aspek aksesibilitas salah satu komponen infrastruktur yang penting dalam destinasi adalah aksesibilitas.

Aksesibilitas menurut Bovy dan Lawson adalah “... *should be possible by public transport and bicycle trails, by pedestrian paths (from neighborhoods) and by cars (mainly families, with an average of three persons/car)*”. Akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aspek fisik yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat.

- d. Aspek aktivitas dan fasilitas dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan yang bermacam-macam. Menurut Bukart dan Medlik, fasilitas bukanlah merupakan faktor utama yang dapat menstimulasi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata, tetapi ketiadaan fasilitas dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Pada intinya, fungsi fasilitas haruslah bersifat melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukan dalam rangka mendapat pengalaman rekreasi. Di samping itu, fasilitas dapat pula menjadi daya tarik wisata apabila penyajiannya disertai dengan keramahtamahan yang menyenangkan wisatawan, dimana keramahtamahan dapat mengangkat pemberian jasa menjadi suatu atraksi wisata. Bovy dan Lawson menyebutkan bahwa fasilitas adalah atraksi buatan manusia yang berbeda dari daya tarik wisata yang lebih cenderung berupa sumber daya.
- e. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Dalam analisa sosial ekonomi membahas mengenai mata pencaharian penduduk, komposisi penduduk, angkatan kerja, latar belakang pendidikan masyarakat sekitar, dan penyebaran penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini perlu dipertimbangkan karena dapat menjadi suatu

tolak ukur mengenai apakah posisi pariwisata menjadi sektor unggulan dalam suatu wilayah tertentu ataukah suatu sektor yang kurang menguntungkan dan kurang selaras dengan kondisi perekonomian yang ada. Selanjutnya adalah mengenai aspek sosial budaya, dimana aspek kebudayaan dapat diangkat sebagai suatu topik pada suatu kawasan. Dennis L. Foster menjelaskan mengenai pengaruh kebudayaan (*cultural influences*) sebagai berikut: “Para pelaku perjalanan tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pada informasi pemrosesan dan pengevaluasian. Mereka juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, masyarakat, dan gaya hidupnya. Kebudayaan itu cenderung seperti pakaian tradisional dan kepercayaan pada suatu masyarakat, religi, atau kelompok etnik (*ethnic group*)”.<sup>16</sup>

- f. Aspek politik dan keamanan. Dalam pengembangan perekonomian dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktor swasta, masyarakat, usaha kecil (*micro bussiness*) diperlukan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Meskipun entitas ini paling memiliki ketahanan (resistensi) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak progresif dan dapat berkembang secara alamiah, namun tetap memerlukan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Secara teknis aktor-aktor non-pemerintah tersebut memiliki ketergantungan dengan politik dan keamanan untuk mengamankan rute bahan baku, energi, kepastian huku, pangsa pasar, aset dan lain-lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Charles R. Goeldner and JR. Brent Richy, 2011, *Tourism: Principles, Practices and Philosophy*, New Jersey: John Willey and Son, hal.41.

<sup>17</sup> K. Sharma, 2004. *Tourism and Economic Development*, New Delhi: Sorup and Sons Publishing, hal,303

Dari paparan di atas sebenarnya pengembangan industri pariwisata untuk meningkatkan profil dan popularitas suatu negara dapat diterapkan ketika suatu negara memiliki daya saing, yaitu keunikan sebagai tolok ukur yang menentukan destinasi pariwisata internasional. Penciptaan atraksi ataupun kegiatan-kegiatan baru akan sulit menjadi penarik wisatawan karena ini bersifat sekunder dan hanya melengkapi obyek atau situs yang ada.

Dalam pengembangan industri pariwisata aspek ekonomi, sosial dan budaya menjadi parameter penting. Kondisi politik-keamanan merupakan akumulasi dari ketiga aspek tersebut.<sup>18</sup> Ketika perekonomian mengalami krisis maka negara akan menjadi labil, demikian halnya dengan dinamika sosial dan budaya, dimana masyarakat yang sebenarnya dapat hidup semestinya dengan memperoleh berbagai layanan pemerintah akan dapat mudah terprovokasi untuk menjalankan gerakan perlawanan antar masyarakat (konflik horisontal) ataupun konflik antar masyarakat dengan elit (konflik vertikal) sehingga ini akan mengganggu eksistensi pariwisata suatu negara. Untuk itulah, kondusifitas politik, ekonomi, budaya dan keamanan menjadi bagian penting bagi pemerintah Maladewa dalam membangun industri pariwisata.<sup>19</sup>

## **2. Kebijakan Kerjasama Luar Negeri**

Kerjasama internasional merupakan bagian penting dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di suatu negara atau suatu wilayah, khususnya berkaitan dengan persoalan sosial, keamanan ataupun perekonomian. Kerjasama internasional menjadi penting ketika sebuah negara atau wilayah memiliki karakter untuk menghindari konsep *non-coercion* dan *non-intervence*, sehingga dalam menyelesaikan sebuah persoalan langkah kolaborasi menjadi sebuah pilihan yang rasional.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Teori Kerjasama Internasional merupakan pendekatan yang berorientasi pada fakta bahwa semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.<sup>20</sup>

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

---

<sup>20</sup> K.J Holsti and Terjemahan M. Tahrir Azhari, 1988, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II.*, Jakarta: Erlangga, hal. 652-653

<sup>21</sup> *Ibid.*

- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”

Implementasi kerjasama internasional dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, masing-masing yaitu:<sup>22</sup>

1. Konsensus, merupakan suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhiruan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang terjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam

---

<sup>22</sup> Koesnadi Kartasasmita. 1998. *Perjanjian InternasionaI*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hal.3.

integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.

Kerjasama luar negeri memiliki peranan penting karena sumber daya negara dunia ketiga yang umumnya terbatas, baik sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, anggaran dan lain-lainnya. Dengan menjalanakan kerjasama luar negeri maka suatu negara dapat menutupi beberapa kekurangan, khususnya pada bidang ekonomi. Di bidang pariwisata kerjasama luar negeri menjadi penting karena kerjasama ini bukan hanya melibatkan aktor-aktor pemerintah (G to G), namun juga aktor swasta (*bussiness*) hingga masyarakat. Selain itu kerjasama luar negeri dapat meningkatkan investasi, diantaranya pembangunan infrastruktur, akomodasi jasa seperti hotel, restoran, perjalanan internasional dan lain-lainnya yang pada akhirnya dapat menjadi percepatan bagi pengembangan pariwisata dan memberikan keuntungan jangka pendek dan panjang.

Dari dua pendekatan di atas maka dapat diaplikasikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018 terbangun atas inisiatif setiap rezim di negara ini yang memandang sektor pariwisata Maladewa sebagai pilar penopang perekonomian nasional. Untuk itu, berbagai kebijakan pengembangan pariwisata domestik dijalankan diantaranya membangun stabilitas politik dan keamanan agar tidak terjadi gejolak melalui pengedepanan fungsi kepolisian dan militer dan pengembangan infrastruktur dan layanan pariwisata. Kemudian kebijakan selanjutnya dijalankan melalui kerjasama internasional antar pemerintah dan sektor swasta, serta promosi luar negeri berbagai even pariwisata internasional.

Dalam bidang pariwisata kerjasama luar negeri tidak hanya dijalankan dalam lingkup kerjasama antar pemerintah (G to G), namun juga sektor swasta. Kerjasama ini secara spesifik akan dapat menyelesaikan masalah tertentu yang nantinya akan membentuk kesepakatan resmi. Keberadaan Maladewa sebagai kelompok negara dunia ketiga kemudian

memerlukan berbagai arus modal, berupa investasi asing untuk dapat membangun pariwisata moderen. Kerjasama ini nantinya akan membentuk konsensus dan kolaborasi sehingga negara investor, diantaranya Uni Eropa, Tiongkok dan beberapa negara lainnya sehingga dapat membangun mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan.

### **E. Hipotesa**

Dengan merunut permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka dapat ditarik hipotesa bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018 adalah meliputi dua hal, yaitu:

- a. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata nasional Maladewa meliputi upaya dalam membangun stabilitas/kondusifitas politik-keamanan domestik dan pengembangan infrastruktur pariwisata.
- b. Implementasi kerjasama luar negeri Maladewa melalui kerangka G to G (*government to government*) dan G to B (*government to bussiness*) melalui investasi dan pengembangan pariwisata internasional terintegrasi, serta promosi luar negeri.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, 1989, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, hal.140-141.

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018..

### **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dan membuktikan hipotesa tentang kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018.
2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan tentang dinamika pariwisata dan pembangunan perekonomian Maladewa periode 2008-2018, meliputi sejarah, perkembangan hingga berbagai dampak positif dan negatif dari eksistensi pariwisata Maladewa tersebut.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu politik dengan spesialisasi program studi hubungan internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

## **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian sejak 2008 hingga 2018. Dipilih tahun 2008 karena menjadi periode yang menunjukkan berbagai inisiatif dari pemerintahan Maladewa di bawah kepemimpinan Menteri Pariwisata Ahmed Ali Sawad yang berhasil membangun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi, sedangkan tahun 2018 merupakan periode yang menunjukkan pencapaian berbagai kebijakan pariwisata dalam dan luar negeri Maladewa dalam pembangunan perekonomian nasional. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang kondisi politik, pemerintahan, sosial dan kebudayaan yang berkaitan dengan dinamika pariwisata Maladewa.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang dinamika pariwisata Maladewa meliputi sejarah, perkembangan dan berbagai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yang membahas tentang kebijakan yang dijalankan pemerintah Maladewa dalam mengembangkan sektor pariwisata pada periode 2008-2018 adalah meliputi kebijakan pengembangan pariwisata domestik dan melalui kerjasama luar negeri.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.